

RAKER KEMENTERIAN KEUANGAN DENGAN KOMISI XI DPR

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) berjabat tangan dengan Ketua Komisi XI Kahar Muzakir (kiri) sebelum mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/4). Raker tersebut membahas tentang dana bagi hasil perkebunan sawit.



FOTO: ANTARA

Pemerintah Alokasikan Rp3,4 T untuk DBH Sawit

Penggunaan DBH Sawit akan digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan kegiatan strategis lainnya yang akan ditetapkan oleh Menkeu. Alokasi DBH Sawit tidak mengurangi alokasi yang dibutuhkan oleh pembangunan daerah melalui DAK Fisik dan/atau program infrastruktur lainnya.

JAKARTA (IM) - Dalam APBN Tahun Anggaran 2023, Pemerintah mengalokasikan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit sebesar Rp3,4 triliun. Jumlah ini telah sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah dengan Badan Anggaran DPR sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN 2023 dan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023.

"Di dalam APBN 2023, DBH itu dialokasikan sebesar tadi telah kami sebutkan Rp136,3 triliun. Alokasi DBH tersebut termasuk di dalamnya adalah DBH sawit yaitu diidentifikasi sebesar Rp3,4 triliun sesuai kesepakatan rapat kerja badan anggaran DPR RI dengan pemerintah," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat melaksanakan Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Selasa (11/4).

Dikutip dari laman Kemenkeu, untuk mendukung penyaluran DBH Sawit ini, Pemerintah tengah meny-

apkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang DBH Perkebunan Sawit. Dalam prosesnya, Pemerintah melakukan konsultasi kepada Komisi XI DPR sebagai komisi yang membina keuangan.

Dalam RPP, alokasi DBH Sawit akan bersumber dari pungutan ekspor (PE) dan bea keluar (BK). Besaran porsi DBH minimal 4% dan dapat ditingkatkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Adapun formula pembagian kepada daerah yakni untuk provinsi 20%, kabupaten/kota penghasil 60%, dan kabupaten/kota berbatasan 20%. Dengan demikian, jika asumsi DBH sebesar 4% maka proporsi provinsi sebesar 0,8%, proporsi kabupaten/kota penghasil 2,4%, dan proporsi kabupaten/kota berbatasan 0,8%. Selain itu akan diterapkan batas minimum alokasi per daerah untuk 2023 yaitu sebesar Rp1 miliar per daerah.

"Karena nanti kita lihat tahun 2022 beberapa bulan

PE dan BK itu nol, sehingga penerimaannya nol, sehingga yang menjadi sumber dana untuk dibagikan juga menjadi nol, maka nanti jumlahnya menjadi terlalu kecil. Ada untuk daerah yang mendapatkan sangat kecil, kami memutuskan ada batas minimum alokasi per daerah minimal mereka mendapatkan satu miliar per daerah," jelas Sri Mulyani.

Sementara itu, perhitungan alokasi per daerah akan didasarkan pada alokasi formula yang dilihat luas lahan dan tingkat produktivitas lahan, serta alokasi kinerja

dengan perubahan tingkat kemiskinan dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kelapa Sawit Berkelanjutan. Jumlah daerah yang akan menerima DBH Sawit yaitu 350 daerah terdiri atas daerah penghasil, daerah berbatasan dengan daerah penghasil, dan provinsi termasuk empat daerah otoritas baru di Papua.

Penggunaan DBH Sawit akan digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan kegiatan strategis lainnya yang akan ditetapkan oleh Menkeu. Alokasi DBH Sawit tidak mengurangi alokasi yang

dibutuhkan oleh pembangunan daerah melalui DAK Fisik dan/atau program infrastruktur lainnya.

RPP juga menyebutkan penyaluran DBH Sawit akan dilakukan sebanyak dua tahap dalam satu tahun pada bulan Mei dan Oktober. Masing-masing periode akan disalurkan 50% dengan memenuhi syarat seluruh berupa rencana kegiatan dan laporan realisasi. Untuk Tahun 2024 dan selanjutnya, nilai minimal alokasi DBH Sawit diusulkan sebesar Rp3 triliun. • **pan**

Kemenperin Terapkan Standardisasi Industri Melalui SIINas

JAKARTA (IM) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan industri yang mandiri dan berdaulat, maju dan berdaya saing, serta berkeadilan dan inklusif. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri.

"Permenperin 45/2022 ini diterbitkan dengan tujuan untuk semakin meningkatkan kualitas produk, memperkuat daya saing industri, serta mengurangi ketergantungan pada produk impor," kata Sekretaris Jenderal Kemenperin, Dody Widodo mewakili Menteri Perindustrian pada acara Kickoff Launching Permenperin 45/2022 di Jakarta, Selasa (11/4).

Dody menyampaikan, ruang lingkup Permenperin 45/2022 antara lain adalah pemerintah akan melaksanakan pembinaan Standardisasi Industri dengan mengatur penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), tata cara penilaian kesesuaian, dan

pengajuan permohonan sertifikasi produk oleh produsen melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). "Selain itu, peraturan ini mengatur tentang pemberlakuan SNI secara wajib dan pengawasan terhadap produk yang beredar di Indonesia," ujarnya.

Dikemukakan Dody, Kemenperin memiliki peranan penting dalam mengatur standardisasi melalui peraturan formal untuk memberikan kepastian dan jaminan kualitas terhadap produk yang dihasilkan oleh industri dalam negeri. "Sehingga produk yang dihasilkan akan memenuhi standar yang telah ditetapkan, sehingga meningkatkan daya saing industri dalam negeri di pasar global," tegasnya.

Sampai saat ini, Kemenperin telah menetapkan sebanyak 123 standar produk yang harus memenuhi standar wajib SNI dan penunjukan LPK yang terdiri dari 47 Lembaga Sertifikasi Produk (LSP) yang mempunyai laboratorium uji.

Dalam konteks substitusi impor, pengaturan standarisasi yang tepat dapat meningkatkan kualitas produk dalam negeri sehingga dapat bersaing dengan produk impor yang memenuhi standar. "Standardisasi ini jadi alat yang dapat mendukung program Kemenperin, yaitu substitusi impor. Karena standardisasi salah satu alat dari sekian banyak non-tariff barrier, yang mendukung penggunaan produk dalam negeri," papar Dody.

Lebih lanjut, ia mengatakan, upaya tersebut dapat memperkuat posisi produk dalam negeri di pasar domestik serta mengurangi ketergantungan pada produk impor dan diharapkan di depannya dapat mendorong pertumbuhan industri nasional yang tangguh dan berdaya saing global.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), Doddy Rahadi mengatakan, implementasi Permenperin 45/2022 juga akan meningkatkan layanan kepada masyarakat industri karena pengajuan permohonan sertifikasi produk melalui SIINas.

• **dro**

FOTO: ANTARA



JALAN TOL DIFUNGSIKAN SEMENTARA JALUR MUDIK

Pekerja menggunakan alat berat saat pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta di Sawit, Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (11/4). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan memfungsikan sementara enam ruas tol baru di Jawa dan empat ruas tol di Sumatera untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan arus lalu lintas mudik Lebaran 2023.



PULAUINTAN
General Contractor

PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA
Solvents, Industrial and Specialty Chemicals

IPO, MPX Logistics Bidik Rp44 M

JAKARTA (IM) - PT MPX Logistics International Tbk berencana melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) dengan menetapkan harga penawaran awal atau book building sekitar Rp103 hingga Rp110 per lembar saham.

Calon emiten berkode saham MPXL ini melepas sebanyak 400 juta saham baru atau sekitar 20 persen dari modal ditempatkan dan disetor setelah IPO, sehingga perseroan ditargetkan meraih dana sekitar Rp41,2 miliar hingga Rp44 miliar.

Direktur Utama MPXL Wijaya Candra dalam keterangan resmi, di Jakarta, Selasa (11/4) menyampaikan, dana hasil IPO setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, sekitar 12,7 persen akan digunakan untuk pembayaran uang muka untuk pembelian armada truk.

Dia menjelaskan perseroan telah melakukan pemesanan sebanyak 10 unit kendaraan dengan harga setiap kendaraan dan karoseri tangki sekitar Rp1,3 miliar untuk meningkatkan pendapatan perseroan.

Kemudian, sebesar 36,9 persen dana hasil IPO untuk pembelian tanah dan bangunan di Provinsi Banten untuk mendukung dan memperlancar aktivitas perseroan.

Sisanya, sekitar 50,2 persen dana hasil IPO untuk modal kerja, yaitu untuk pembelian material, biaya operasional, pemeliharaan kendaraan, biaya kantor lainnya, dan pelunasan utang dagang," ujar Wijaya. • **dot**

tor lainnya, pelunasan utang dagang, dan pelunasan akrual. Bersama dengan IPO, perseroan juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 80 juta Waran Seri I atau setara dengan sebanyak-banyaknya 5 persen dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh.

Waran Seri I akan diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru, dengan setiap pemegang 5 saham baru perseroan berhak memperoleh 1 Waran Seri I, yang mana setiap 1 Waran Seri I dapat ditukar dengan 1 saham biasa.

Kisaran harga pelaksanaan sebesar Rp198 hingga Rp368 setiap saham, yang dapat dilaksanakan setelah 6 bulan sejak Waran Seri I diterbitkan, yaitu mulai tanggal 9 November 2023 sampai dengan 8 Mei 2024.

Rencananya, masa penawaran umum akan dilakukan pada 3 hingga 5 Mei 2023, distribusi secara elektronik pada 8 Mei 2023, serta pencatatan secara resmi di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan dilangsungkan pada 9 Mei 2023.

"Sementara dari pelaksanaan Waran Seri I yang kami tawarkan guna menarik minat investor, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja, yaitu untuk pembelian material, biaya operasional, pemeliharaan kendaraan, biaya kantor lainnya, dan pelunasan utang dagang," ujar Wijaya. • **dot**

Penjualan SBN SR018 Lewat BRI Tembus Rp1,7 Triliun

JAKARTA (IM) - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) sebagai mitra pemerintah dalam melakukan penjualan Surat Berharga Negara (SBN) mencatatkan penjualan SBN SR108 melebihi target untuk periode 3 Maret 2023 - 29 Maret 2023.

Hingga akhir masa penawaran SR018, tercatat penjualan SR018 mencapai Rp 1,7 triliun atau 231,25% dari target yang telah ditetapkan oleh Kemenkeu.

Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani mengungkapkan, angka tersebut meningkat dibandingkan penjualan SR017 pada tahun 2022 yang realisasi penjualannya sebesar Rp 1,01 triliun. Hal ini menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap penjualan SBN SR018. Diketahui, terdapat dua jenis tenor yang dikeluarkan pada seri itu, yakni SR018-T3 dengan tenor 3 tahun dan SR018-T5 dengan tenor 5 tahun," kata Handayani dalam keterangan tertulis, Selasa (11/4).

Ia menjelaskan produk SR018 dapat dijadikan alternatif penempatan investasi yang aman dan memberikan imbal hasil yang menarik bagi investor.

"Dengan tingginya minat investor dalam melakukan pembelian produk SR018 dan telah melampaui target, maka dapat menjadi salah satu

penanda bahwa pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya berinvestasi semakin meningkat," ungkapnya.

Menurutnya, Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang besar dalam penjualan SBN. Hal itu didasari karena masyarakat sudah memahami SBN cocok dijadikan sebagai alokasi portofolio nasabah dengan profil risiko konservatif, moderat, hingga agresif.

Ia menjelaskan pihaknya bakal terus berupaya untuk bermitra dengan pemerintah dalam memasarkan produk SBN. Hal itu juga sebagai upaya dari BRI untuk mendukung proses pemulihan ekonomi dan mendorong pertumbuhan inklusi keuangan Indonesia.

"Ke depan, BRI juga terus berkomitmen menyediakan alternatif investasi yang sangat menarik dan aman bagi masyarakat. Handayani menambahkan, perseroan selalu berupaya membangun dan menciptakan *economic* dan *social value* bagi masyarakat Indonesia," katanya.

Ia menjelaskan untuk keamanan dan kenyamanan nasabah dalam berinvestasi, pihaknya turut bekerja sama dengan manager investasi, asurador atau perusahaan asuransi maupun sekuritas terpercaya.

Menurutnya, langkah itu dilakukan karena BRI ingin menjadi pilihan utama bagi nasabah dalam mempercayakan seluruh transaksi perbankan serta dapat menjadi finansial supermarket dalam menjawab beragam kebutuhan investasi dan proteksi. • **hen**

IFC Sebut Sertifikasi Bangunan Hijau di Indonesia Mencapai 4%

DENPASAR (IM) - Korporasi Keuangan Internasional (IFC) sebagai bagian kelompok Bank Dunia menyebutkan sertifikasi bangunan hijau di Indonesia mencapai sekitar 4% dari total luas bangunan yang sudah disertifikasi secara global mencapai 55 juta meter persegi selama 2015-2022.

"Total area di seluruh dunia mencapai 55 juta meter persegi, Indonesia hampir dua juta meter persegi atau sekitar empat persen," kata Koordinator Program IFC Wilayah Asia Timur Farida Lasida Adji dalam lokakarya terkait bangunan hijau di Denpasar, Selasa (11/4).

Dikutip dari Antara, ia mengungkapkan selama sekitar tujuh tahun itu, IFC Bank Dunia mencatat total sudah ada sekitar 100 proyek bangunan di Indonesia yang sudah mengantongi sertifikasi desain terbaik untuk efisiensi lebih besar atau EDGE yang sifatnya masih sukarela.

Dari seratusan proyek itu, ia mencatat bangunan hijau yang mendapatkan sertifikasi di antaranya sejumlah kampus negeri di antaranya UGM, UI, ITB, rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Jakarta, hingga satu rumah sakit masing-masing di Jakarta dan Bogor, Jawa Barat. "Capaian empat persen itu masih sangat

kecil dibandingkan luasan bangunan yang ada," katanya.

Sedangkan negara dengan sertifikasi bangunan hijau terbanyak, kata dia, ada di Kolombia yang banyak menyasar kawasan permukiman.

Farida menjelaskan negara di Amerika Selatan itu memberikan insentif baik dari perbankan dan pemerintah setempat. Lebih jauh ia mengatakan Indonesia melalui Bank Indonesia telah menerbitkan peraturan yang merelaksasi ketentuan untuk properti ramah lingkungan.

Bank Indonesia melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24 tahun 2022 mengatur rasio loan to value (LTV) atau rasio pinjaman dibandingkan dengan nilai properti.

Dengan aturan itu, BI melanjutkan dukungan termasuk untuk pengembangan bangunan berwawasan lingkungan atau bangunan hijau dengan batasan rasio paling tinggi 100 persen yang mulai berlaku 1 Januari 2023.

Kebijakan itu memungkinkan calon debitur properti membayar uang muka (DP) nol persen, alias tak perlu bayar uang muka ketika memanfaatkan fasilitas kredit pemilikan rumah. Pihaknya fokus menekankan bangunan hijau yakni efisiensi energi, air dan material bangunan. • **hen**